



STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG DALAM PENANGANAN KEMACETAN DI JALAN BOJONGSOANG - DAYEUKHKOLOT

¹Windi Nur Azizah & ²Medi Mahendra

¹ Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bale Bandung,
Bandung, Jawa Barat, Indonesia
wndnrzzh@gmail.com

² Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bale Bandung,
Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Received 21 September 2024; Revised: 24 September 2023; 25 September 2024; Published: September 2024; Available online: September 2023

ABSTRAK

Kemacetan di jalan Bojongsoang-Dayeuhkolot ini disebabkan karena adanya perubahan penggunaan lahan yang menyebabkan terjadinya urban sprawl, genangan banjir, dan wilayah tersebut yang berdekatan dengan pusat pendidikan, pusat perbelanjaan, industri, perumahan dan layanan kesehatan. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam penanganan kemacetan di jalan Bojongsoang-Dayeuhkolot dengan menggunakan teori manajemen strategi Fred David. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan indikator dari formulasi strategi yaitu dengan pengembangan sistem pelayanan angkutan umum dengan membuat lintas raya terpadu kereta dan dengan penambahan kapasitas ruas jalan melalui pembangunan *fly over*. Kemudian implementasi strategi yang dilakukan sudah cukup baik dengan pengembangan sistem pelayanan angkutan umum yang sudah terealisasi yaitu transmetro pasundan, kemudian menetapkan petugas pengatur lalu lintas di titik kemacetan dan melakukan survei lalu lintas. Indikator yang ketiga yaitu evaluasi strategi adanya kebutuhan pengembangan prasarana jalan dengan mengembangkan dan mengakomodir prinsip *transitoriented development* (area transit) kemudian hal yang perlu diperbaiki dengan meningkatkan koordinasi kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya.

Key Word: Strategi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Penanganan Kemacetan

PENDAHULUAN

Transportasi dijadikan sebagai alat utama untuk kegiatan masyarakat, baik darat, laut dan udara. Tujuannya transportasi tersebut tidak lain untuk mempercepat dan mempermudah akses dalam melakukan kegiatan, sehingga tidak sedikit orang-orang yang menggunakan transportasi tersebut. Motor dan mobil adalah kendaraan yang sulit dikendalikan jika sudah dijalanan karena banyak orang yang memilikinya, sehingga terjadilah kepadatan kendaraan di jalan.

Kemacetan merupakan kepadatan kendaraan yang terjadi di jalanan, yang dimana kemacetan tersebut bisa dikatakan bahwasannya kemacetan merupakan suatu permasalahan yang berdampak pada kerugian sehingga perlu diselesaikan karena bisa berdampak pada kerugian ekonomi seperti borosnya bahan bakar, serta berdampak juga pada lingkungan karena meningkatnya polusi, bukan hanya itu waktupun boros sehingga untuk yang sedang bekerja waktunya jadi lebih sedikit apalagi seperti gojek jika sedang mengejar target, penghasilannya pun dapat berkurang.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (4) bahwasannya Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

- a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota yang jaringannya berada di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan angkutan umum di Kabupaten/Kota;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota.¹

Kemacetan terjadi tidak hanya di perkotaan besar, di jalan Bojongsoang dan Dayeuhkolot pun menjadi salah satu jalan yang sering terjadi kemacetan karena jalan yang dekat dengan fasilitas-

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Bab IV Pasal 6 Ayat (4).

fasilitas umum seperti pasar, pusat pendidikan, pekerjaan dan bahkan jalan yang sering terkena banjir. Sehingga dengan adanya kemacetan di

jalan Bojongsoang-Dayeuhkolot ini berdampak pada kegiatan masyarakat yang terhambat.

Gambar 1. Kemacetan Bojongsoang dan Dayeuhkolot



Sumber: (Dokumentasi Peneliti, 2024)

Bojongsoang merupakan salah satu akses utama masyarakat Kabupaten Bandung Selatan yang akan menuju Kota Bandung, dan begitupun sebaliknya. Kemacetan di kawasan Bojongsoang Kabupaten Bandung sudah dalam tahap serius sehingga penanganannya seharusnya menjadi salah satu agenda prioritas Pemerintah Daerah.

Dayeuhkolot menjadi salah satu kawasan yang sering

terkena banjir apalagi saat musim hujan tiba, karena Dayeuhkolot terletak di cekungan Bandung dan di lintasi Sungai Citarum, letak geografis Dayeuhkolot berbatasan langsung dengan Kota Bandung, maka di pastikan jalur transportasi dari Bandung akan terputus selama banjir dan akan berdampak kepadatan kendaraan di jalan Dayeuhkolot tersebut

Gambar 2. Banjir Dayeuhkolot



Sumber: (Dokumentasi Peneliti, 2024)

Selain itu sopir angkutan umum saat bubar atau masuk jam kerja PT. Metro Garmin dan juga pabrik industri lainnya yang berada disepanjang jalan Dayeuhkolot yang berhenti dan mengetem sembarangan ini menjadi faktor penyebab terjadinya kemacetan.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam melakukan penanganan kemacetan supaya tertangani yaitu dengan melakukan pengawasan rutin, mengkaji kembali penataan parkir, sosialisasi kepada masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya, kemudian dengan menerapkan strategi *one way traffic* (jalan satu arah), dan peningkatan rambu-rambu lalu lintas

Berdasarkan pada hal tersebut, peneliti dalam hal ini ingin melihat sejauh mana strategi Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam penanganan kemacetan di jalan Bojongsoang - Dayeuhkolot.

METODE PENELITIAN

Dalam peneitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana menurut menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip Zainal Arifin, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

jenis penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk mengungkapkan suatu

masalah atau peristiwa, dengan demikian peneliti ini berupaya mendeskripsikan secara jelas mengenai strategi Pemerintahan Daerah dalam menangani permasalahan kemacetan, lalu menguraikan, menginterpretasikan permasalahan serta kemudian mengambil kesimpulan yang selanjutnya setiap data yang di peroleh tersebut kemudian akan disajikan dalam bentuk kata-kata agar mudah dimengerti dan dipahami sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Adapun kemudian dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan pengumpulan data menurut Sugiyono, 2021 mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian, yaitu: wawancara, dokumentasi dan observasi. teknik pengumpulan data dengan observasi karena berkenaan dengan proses kerja, perilaku manusia dan gejala-gejala alam yang dapat di teliti yaitu strategi dari pemerintahan daerah dalam menangani permasalahan kemacetan.

PEMBAHASAN

Kecamatan Bojongsoang merupakan salah satu wilayah yang berkembang pesat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terletak strategis di tengah cekungan Bandung, kecamatan ini menjadi penghubung penting antara Kota Bandung dan wilayah sekitarnya. Dengan kondisi geografis yang relatif datar dan didukung oleh iklim tropis, Bojongsoang memiliki potensi pertanian yang cukup baik. Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur, wilayah ini juga mengalami perubahan tata ruang yang signifikan, ditandai dengan munculnya kawasan perumahan dan pusat perbelanjaan. Meskipun demikian, Bojongsoang masih menghadapi tantangan seperti banjir musiman akibat aliran Sungai Citarum.

Dayeuhkolot, dulunya bernama Karapyak, merupakan pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung pada masa lalu. Nama Karapyak sendiri merujuk pada rakit penyeberangan yang menjadi sarana transportasi utama di wilayah tersebut. Namun, pada masa Pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, pusat pemerintahan dipindahkan ke

tepi Sungai Cikapundung karena dianggap lebih strategis untuk pengembangan wilayah. Sejak saat itu, Karapyak kemudian dikenal sebagai Dayeuhkolot yang berarti kota tua.

Letak geografis Dayeuhkolot yang berada di cekungan Bandung dan dilalui Sungai Citarum membuatnya rentan terhadap banjir. Hampir seluruh wilayah Dayeuhkolot berpotensi terendam banjir setiap tahunnya, terutama saat musim hujan tiba. Kondisi ini menjadi masalah serius bagi masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah karena berdampak pada aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari.

Kawasan Bojongsoang-Dayeuhkolot mengalami kemacetan parah akibat beberapa faktor. Tingginya aktivitas di area ini, seperti permukiman padat, pusat pendidikan, dan pusat perbelanjaan, meningkatkan volume kendaraan. Jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung serta peningkatan jumlah kendaraan memperparah situasi. Pertumbuhan penduduk yang pesat akibat pembangunan perumahan baru dan

infrastruktur jalan yang tidak memadai juga menjadi penyebab utama. Selain itu, banjir musiman dan kurangnya manajemen lalu lintas yang efektif semakin memperburuk kondisi. Ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum juga turut berkontribusi pada kemacetan.

Dalam upaya menjalankan visi dan misinya, Pemerintah Kabupaten Bandung telah membentuk berbagai Perangkat Daerah. Perangkat Daerah ini memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan Pemerintahan tersebut meliputi berbagai bidang, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, hingga Infrastruktur.

Secara keseluruhan, Dayeuhkolot memiliki sejarah yang kaya dan potensi yang besar. Namun, wilayah ini juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan bencana alam dan Pembangunan Daerah. Pemerintah dan masyarakat setempat perlu bekerja sama untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mewujudkan

Dayeuhkolot yang lebih maju dan sejahtera.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengatasi kemacetan di Jalan Bojongsoang-Dayeuhkolot. Kemacetan di Jalan Bojongsoang-Dayeuhkolot telah menjadi permasalahan serius yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beberapa faktor penyebab utama kemacetan antara lain: tingginya kepadatan penduduk, meningkatnya jumlah kendaraan, adanya pusat-pusat kegiatan seperti pusat perbelanjaan dan pendidikan, serta kurangnya infrastruktur jalan yang memadai. Selain itu, banjir musiman juga memperparah kondisi kemacetan di wilayah ini.

Dampak dari kemacetan di Jalan Bojongsoang-Dayeuhkolot sangat signifikan. Kemacetan menyebabkan waktu tempuh menjadi lebih lama, konsumsi bahan bakar meningkat, polusi udara bertambah, dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Hal ini tentunya mengganggu aktivitas masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan, penelitian ini menemukan beberapa poin penting. Peluang yang ada antara lain rencana Pengembangan Transportasi Publik perkotaan dan perhatian khusus dari Bupati Bandung. Namun, tantangannya cukup kompleks, seperti adanya campuran tata guna lahan (mix land use) dan jenis kendaraan (mix traffic) di sepanjang jalan tersebut.

Untuk mengatasi kemacetan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung telah merancang beberapa strategi. Salah satu strategi utama adalah pengembangan sistem pelayanan angkutan umum dengan membangun Lintas Raya Terpadu (LRT). Selain itu, pembangunan flyover juga menjadi solusi yang dipertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas jalan.

Analisis data menunjukkan bahwa pembangunan flyover dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pelebaran jalan. Hal ini dikarenakan biaya pembangunan flyover yang lebih rendah dan proses perizinan yang lebih sederhana. Namun, keputusan akhir terkait pembangunan flyover masih berada di tangan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pihak yang berwenang atas jalan provinsi.

Dalam merumuskan strategi mengatasi kemacetan di Jalan Bojongsoang-Dayeuhkolot, Pemerintah Kabupaten Bandung menghadapi sejumlah peluang dan tantangan. Peluang utama adalah adanya rencana pengembangan transportasi publik skala besar di wilayah metropolitan Bandung serta dukungan dari pemerintah daerah. Namun, tantangannya cukup kompleks, seperti keberadaan berbagai jenis bangunan dan aktivitas di sepanjang jalan (mix land use), serta tingginya variasi pengguna jalan (mix traffic).

Selain itu, kendala internal juga mempengaruhi upaya mengatasi kemacetan. Kendala tersebut antara lain terbatasnya anggaran untuk pengaturan lalu lintas di luar jam sibuk dan kebiasaan masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah berencana mengembangkan sistem transportasi umum yang lebih baik dan menambah kapasitas jalan. Rencana ini meliputi pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) dan flyover.

Pembangunan flyover dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pelebaran jalan karena biaya yang lebih rendah dan proses perizinan yang lebih sederhana.

Namun, implementasi rencana tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan alternatif dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan keberhasilan upaya mengatasi kemacetan di Jalan Bojongsoang-Dayeuhkolot.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pembangunan jalan alternatif sebagai solusi mengatasi kemacetan di Jalan Bojongsoang-Dayeuhkolot dinilai kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti kesulitan dalam pembebasan lahan yang membutuhkan biaya yang sangat besar dan dapat membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, pembangunan flyover dianggap sebagai solusi yang lebih rasional dan efisien untuk

meningkatkan kapasitas jalan serta mengurangi kemacetan.

Pemerintah Kabupaten Bandung, melalui Dinas Perhubungan, telah merumuskan beberapa strategi untuk mengatasi kemacetan di wilayah tersebut. Selain pembangunan flyover, upaya lain yang dilakukan adalah pengembangan sistem pelayanan angkutan umum yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum sehingga mengurangi volume kendaraan di jalan.

Untuk mendukung pelaksanaan strategi tersebut, berbagai pihak terkait bekerja sama. Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Kepolisian setempat secara rutin melakukan pengamanan dan penertiban di Jalan Bojongsoang, terutama pada jam-jam rawan kemacetan yaitu pagi dan sore hari. Upaya ini diharapkan dapat membantu mengoptimalkan kinerja transportasi dan mengurangi tingkat kemacetan.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah dalam mengatasi kemacetan di Jalan Bojongsoang-Dayeuhkolot

menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait serta dukungan dari masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.

Pelaksanaan strategi penanganan kemacetan di Jalan Bojongsoang-Dayeuhkolot menghadapi beberapa kendala. Selain keterbatasan anggaran dan kompleksitas tata guna lahan, tantangan lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan masih seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas seperti parkir sembarangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kerja sama yang baik antara berbagai pihak. Saat ini, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Kepolisian telah bekerja sama untuk melakukan penertiban lalu lintas di wilayah tersebut. Namun, masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi, seperti praktik pungli yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pengembangan konsep Transit Oriented Development (TOD).

TOD bertujuan mengintegrasikan sistem transportasi massal dengan kegiatan masyarakat, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Namun, implementasi TOD di Kabupaten Bandung masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya kualitas layanan angkutan umum dan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas.

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kemacetan, diperlukan beberapa upaya. Selain meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas dan menggunakan transportasi umum. Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki infrastruktur jalan dan meningkatkan kualitas layanan transportasi umum.

Secara keseluruhan, mengatasi kemacetan di Jalan Bojongsoang-Dayeuhkolot merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Keterlibatan aktif masyarakat sangat

penting untuk keberhasilan upaya ini.

Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Kemacetan

Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemacetan ini. Survei lalu lintas rutin dilakukan untuk memantau perkembangan situasi. Kerjasama dengan kepolisian dan pembuatan rencana regulasi lalu lintas juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen lalu lintas. Pemasangan peralatan pemantauan lalu lintas seperti CCTV dan kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya transportasi umum juga menjadi bagian dari solusi. Peningkatan infrastruktur jalan dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan juga dianggap penting. Pembatasan izin operasional untuk pembangunan komersial dan perumahan baru juga menjadi kebijakan yang diterapkan.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung telah berperan aktif dalam merumuskan dan melaksanakan strategi mengatasi kemacetan di Jalan

Bojongsoang-Dayeuhkolot.

Fokus utama adalah pada pengembangan transportasi umum dan peningkatan untuk meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan kualitas layanan transportasi umum. Penerapan konsep TOD juga diyakini dapat memberikan solusi jangka panjang untuk permasalahan kemacetan di kawasan tersebut.

Masalah kemacetan di Bojongsoang-Dayeuhkolot merupakan permasalahan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, S. (2012). Kajian Tingkat Kemacetan Lal Lintas Pada Jaringan Jalan Yang Menjadi Akses Masuk Kota Semarang. *Jurnal Unnes*, Vol 1 No 1.

Candriyanto, C. (2021). Proses Penanganan Clearance Kapal /halaman-utama/amp/pr-3036317699/ruas-bojongsoang-satu-titik-masalah-urban-pinggiran?page=all

Freed David. (2014). Manajemen Strategi. *Pustaka Abadi*, 6-7.

Gladies, S. (2022). Strategi Pemerintah Kota Bitung Dalam Pengendalian Pertumbuhan

kapasitas jalan. Meskipun telah mencapai kemajuan, masih diperlukan upaya lebih lanjut

kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini telah dilakukan, namun masih perlu ditingkatkan. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, diharapkan masalah kemacetan ini dapat teratasi secara

Keagenan. *Jurnal UNIMAR AMNI*.

Endah Asih Lestari, E. N. (2023, Februari 24). *Ruas Bojongsoang, Satu Titik Masalah Urban Pinggiran*. Retrieved Maret 10, 2024, from Koran Pikiran Rakyat:

<https://koran.pikiran-rakyat.com>

Penduduk Di Kecamatan Maturi. *Jurnal Governance*, 5.

Joewono, T. B. (2019, Desember 16). *Paradoks kemacetan perkotaan dan solusi untuk mengatasinya*. Retrieved Maret 10, 2024, from The Conversation:

<https://theconversation.com/paradoks-kemacetan-perkotaan-dan-solusi-untuk-mengatasinya-127021>

- Lubis, Y. A. (2016). Analisis Biaya Kemacetan Di Jalan Setiabudi. *Jurnal Warta*, 2.
- Perangkat Daerah. (n.d.). Retrieved Maret 11, 2024, from Ensiklopedia Dunia: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Perangkat_daerah
- Permanasari, I. (2023, April 12). *Kemacetan yang Terjadi di Bojongsoang*. Retrieved Maret 11, 2024, from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/amp/indahpermm/6436c1b64addee2a8d0f6594/kemacetan-yang-terjadi-di-bojongsoang>
- Ramadhan, Y. (2022, September). Strategi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Di Kota Tasikmalaya. *Unikom*, 10.
- Adiwilaga Rendy, Alfian Yani, Rusdia Ujud. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ritonga, Z. (2020). *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- S.Maha, E. (2022). Analisis Faktor Pendorong Penyebab Terjadinya Kemacetan Di Kawasan Pajus Padang Bulan Medan. *Jurnal Samudra*, Vol 05 No 1.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Zakiah, S. (2024, Januari 12). *Banjir Picu Kemacetan Parah di Dayeuhkolot*. Retrieved Maret 11, 2024, from [Metrotvnews.com: https://www.metrotvnews.com/play/NnjC4ZgO-banjir-picu-kemacetan-parah-di-dayeuhkolot](https://www.metrotvnews.com/play/NnjC4ZgO-banjir-picu-kemacetan-parah-di-dayeuhkolot)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Bab 4 Pasal 6 Ayat (4) Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan
- Peraturan Bupati Bandung, Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah <https://bandungkab.go.id/>
- https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Perangkat_daerah
- Wawancara: Dedi S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung, Senin 15 Juli 2024; Pukul 13.05 WIB

Wawancara: Rahmadi, A.Ma.PKB.,S.IP selaku Analisis Kebijakan Pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Senin 29 Juli 2024; Pukul

12.34 WIB

Wawancara: Zulfa selaku Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Petugas Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Senin 29 Juli 2024; Pukul 13.10 WIB

Wawancara: Asep Wahyu selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Dayeuhkolot, Senin 29 Juli 2024; Pukul 11.04 WIB

Wawancara: Tatang selaku Kasi Pemerintahan dan juga Kanit Satpol PP Kecamatan Bojongsoang, Kamis 25 Juli 2024, Pukul;13.05

Wawancara: Ade Andri Alpriatna selaku pengguna jalan, Sabtu 3 Agustus 2024; Pukul 15.12 WIB